

HETEROGENITAS KEMISKINAN DAN DETERMINANNYA: STUDI KASUS KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI PAPUA

1. Jihad Luksi Panjawa¹

1. Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar, Magelang, Indonesia

Email: jipanjawa@untidar.ac.id

Abstract

Poverty in Indonesia experiences a declining trend, both in number and percentage, but Papua Province is not the case. The number of poor people in Papua has increased and the position of poverty levels is higher than the national level. Heterogeneity of poverty occurs in the districts and cities of Papua. The purpose of this study is to analyze the determinants of poverty in regencies and cities in Papua Province. Determinants of poverty include economic growth, human development, decentralization, and regional status. This research uses quantitative methodology with multiple linear regression analysis cross-section analysis tools. The findings of this study are an increase in economic performance which is proxied by economic growth that can reduce poverty levels in districts and cities in Papua Province. Other findings, show an increase in the quality of human resources as a form of human development in proxy with the human development index is also able to reduce poverty levels. The results of this study also show that regional status and fiscal decentralization have not been able to significantly influence poverty reduction. Government policies need to be formed in forming partnerships with the public and the private sector in improving economic performance and human development in order to improve the welfare of the community. In addition, without ignoring the decentralization policy, the management of potential resources needs to be optimized to increase the ability and independence of the region in financing regional expenditure, particularly in poverty alleviation programs.

Keywords: *Poverty; Economic Growth; Human Development; Decentralization; Regional Status*

JEL Classification: *I32; O15; O40; R11*

1. PENDAHULUAN

Tujuan akhir pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan adalah rendahnya tingkat kemiskinan. Menurut Samputra & Munanda (2019), presentase penduduk miskin meningkat, mencerminkan semakin rendahnya tingkat kesejahteraan suatu negara. Selama ini, kemiskinan selalui menjadi isu strategis dalam pembangunan suatu negara. Terbukti, setelah Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDGs*) berakhir, tertuang kembali tujuan pembangunan mengenai tidak adanya kemiskinan dalam bentuk apapun muncul pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas kemampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam berkehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum seperti terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik (Badan Pusat Statistik, 2017b). Selama dua dekade, Indonesia masih mendapatkan tantangan dalam pembangunan nasionalnya, yaitu permasalahan kemiskinan dan kondisinya yang sekarang ini termasuk sebagai

negara berpenghasilan menengah (*middle income country*).

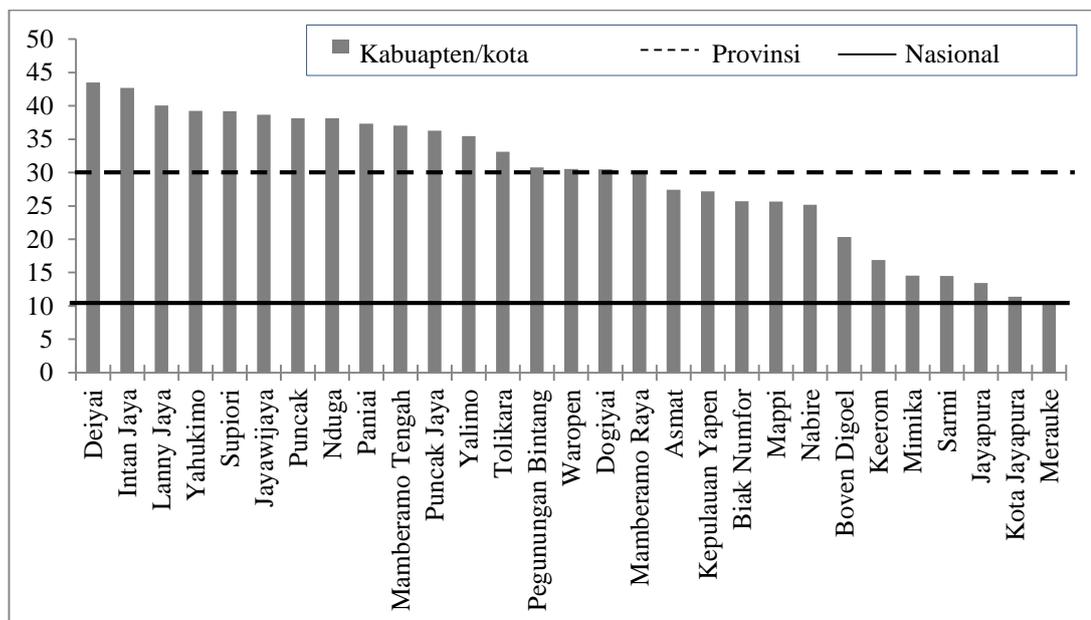
Berdasarkan tabel 1, perkembangan kemiskinan di Indonesia tahun 2014-2018 cenderung mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Adapun penurunan kemiskinan yang terjadi baik secara absolut maupun relatif. Penurunan presentase kemiskinan secara nasional, juga dialami Provinsi Papua selama periode tahun yang sama. Namun, presentase kemiskinan Provinsi Papua menunjukkan posisi lebih tinggi dibandingkan nasional. Selain itu, secara jumlah dan porsi penduduk miskin di Provinsi Papua cenderung mengalami peningkatan.

Lebih lanjut, kondisi kemiskinan provinsi yang lebih tinggi dibandingkan nasional juga dialami kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Pada gambar 1 menunjukkan tingkat kemiskinan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Papua lebih tinggi dibandingkan nasional. Selain itu, masih banyak kabupaten yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Papua. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya dinikmati secara merata di kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

Tabel 1. Jumlah dan Presentase Kemiskinan Provinsi Papua terhadap Nasional

| Wilayah/Tahun | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Presentase Kemiskinan (%) | | | | | |
| Provinsi Papua | 27,80 | 28,17 | 28,54 | 27,62 | 27,74 |
| Indonesia | 10,96 | 11,13 | 10,70 | 10,12 | 9,66 |
| Penduduk Miskin (ribu jiwa) | | | | | |
| Provinsi Papua | 864,11 | 898,21 | 914,87 | 910,42 | 915,22 |
| Indonesia | 27727,78 | 28592,79 | 27764,32 | 26582,99 | 25674,58 |

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, berbagai tahun (diolah)



Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota, Provinsi Papua dan Nasional 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2018

Berdasarkan data mengenai perkembangan kemiskinan seperti yang telah dijelaskan di muka, permasalahan kemiskinan di Indonesia ternyata jauh lebih kompleks. Secara makro, menunjukkan perkembangan yang menurun akan kemiskinan, namun secara regional atau lokal menunjukkan kondisi sebaliknya. Munculnya fenomena-fenomena dalam pembangunan tersebut karena adanya pergeseran dan perubahan paradigma pembangunan ekonomi. Kesalahan dalam rangka penerapan model pembangunan yang menjadi faktor penyebab munculnya distorsi. Pergeseran paradigma pembangunan dilakukan dengan merubah kecenderungan dalam mengukur keberhasilan pembangunan secara makro menjadi pendekatan-pendekatan regional dan daerah. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menganalisis determinan dari heterogenitas kemiskinan kabupaten dan kota di Provinsi Papua.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) adalah tidak ada kemiskinan dimanapun. Suatu perencanaan, strategi dan kebijakan pembangunan dalam mengatasi kemiskinan terus diterapkan secara terintegrasi mulai dari nasional sampai regional. Rustiadi, *et al.* (2011) menjelaskan pergeseran dan perubahan paradigma pembangunan ekonomi dilakukan dengan merubah kecenderungan dalam mengukur keberhasilan pembangunan secara makro menjadi pendekatan regional dan daerah.

Banyak kajian mengenai kemiskinan agar mendapatkan formula yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa kajian mengenai kemiskinan dengan pendekatan dan metode yang berbeda mulai dari metode panel data (Dartanto & Nurkho-

lis, 2013; Prapdopo, 2018; Samputra & Munanda, 2019; Sofilda, *et al.*, 2013; Widianingrum, *et al.*, 2019), regresi berganda (Adeyemi, *et al.*, 2009; Astrini & Purbadharmaja, 2013), analisis jalur (Prapdopo, 2018), probit dan tobit (Achia, *et al.*, 2010; Akerele, *et al.*, 2012; Islam, *et al.*, 2017), model dinamis dengan *spatial autoregressive* (Caraka, 2017), metode *Growth Incidence Curve* dan *Pro-Poor Growth Index* (Permadi, 2018). Selain itu, indikator dan tingkat dimensi yang berbeda mulai antar negara (Adeyemi *et al.*, 2009), suatu negara (Islam *et al.*, 2017; Kediri & Mckay, 2005; Permadi, 2018), antar provinsi (Dartanto & Nurkholis, 2013; Pratama, 2014; Samputra & Munanda, 2019; Sofilda *et al.*, 2013), tingkat provinsi (Astrini & Purbadharmaja, 2013; Caraka, 2017; Sisca, *et al.* 2013; Usman & Diramita, 2018), antar kabupaten di dalam satu provinsi (Prapdopo, 2018; Sofilda *et al.*, 2013; Widianingrum *et al.*, 2019).

Terkait konsep dan ukuran kemiskinan, beberapa tawaran konsep dan pengukuran dapat digunakan sesuai dengan kondisi guna mendapatkan indikator kesejahteraan yang memadai. Indeks kemiskinan FGT adalah pengukuran indeks yang dicetuskan oleh Foster, *et al.* (1984) dapat digunakan sebagai alternatif dalam pengukuran kemiskinan suatu wilayah (Bogale, *et al.*, 2005). Singh (2012) menawarkan pengukuran baru kemiskinan dengan ketidaksetaraan indeks kemiskinan yang mirip dengan literatur ketidaksetaraan akan kesempatan (*inequality of opportunity*). Indeks tersebut muncul karena indeks kemiskinan yang umum digunakan dan gagal dalam menangkap intensitas yang diferensial dari kemiskinan di berbagai kelompok sosial-ekonomi.

Kebijakan-kebijakan terus dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai faktor yang berperan untuk mengentaskan kemiskinan. Salah satu indi-

kator yang digunakan untuk pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan manusia melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Faktor yang signifikan berkontribusi dalam penurunan tingkat kemiskinan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber daya manusia menjadi aset yang sangat penting dan investasi yang tidak ternilai dalam jangka panjang. Apabila pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan melalui pengembangan kualitas sumber daya manusia (Prapdopo, 2018; Samputra & Munanda, 2019; Sofilda *et al.*, 2013). Sebagai indikator pengukur keberhasilan pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) yang memiliki konsep dasar yang dimiliki manusia diharapkan mampu membawa perubahan dalam kesejahteraan manusia (Arsyad, 2010; Badan Pusat Statistik, 2017a).

Peran dari pertumbuhan ekonomi yang digunakan pula dalam melihat keberhasilan pembangunan, juga menjadi syarat bagi pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat dirasakan secara merata disetiap golongan masyarakat, termasuk penduduk miskin. Dalam hipotesis Kuznet, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat. Pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan relatif cenderung tinggi karena pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari distribusi pendapatan belum merata ke semua golongan. Namun, dalam jangka panjang, dengan pelaksanaan pembangunan yang mulai merata, secara berangsur-angsur mampu mengurangi kemiskinan (Arsyad, 2010; Prapdopo, 2018). Paradox hubungan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mungkin terjadi. Selain disebabkan priode waktu yang singkat (jangka pendek), pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu

menurunkan kemiskinan. Hal tersebut dapat juga disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang diimplementasikan tidak *pro poor* tetapi *pro rich*, pengeluaran yang kurang produktif pada sektor-sektor basis dan bahkan akibat investasi yang padat modal.

Salah kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya mengentaskan kemiskinan yaitu dengan kebijakan otonomi daerah. Menurut Mcwilliam (2011) dan Seymour & Turner (2002), kabupaten atau kota merupakan bentuk otonomi yang sesungguhnya. Semenjak pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat lokal daripada pemerintah pusat melalui otonomi daerah, pemerintah mampu memperbaiki efisiensi ekonomi, lebih tanggap terhadap kebutuhan dan preferensi lokal. Pemerintah dan juga masyarakat diharapkan mampu memberdayakan sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan ekonomi daerah yang lebih berotonom. Salah satu euforia dan konsekuensi logis dari kebijakan otonomi daerah adalah tuntutan pembentukan daerah baru (pemekaran) dari pemerintah daerah yang ada. Menurut Jamal (2017), dorongan daerah-daerah untuk melakukan proliferasi wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan.

Lebih lanjut, adanya otonomi daerah menuntut peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berpotensi untuk mengurangi kemiskinan apabila ditandai dengan otonomi keuangan yang lebih besar dari unit lokal dengan alokasi anggaran yang tepat, prioritas, akuntabilitas dan responsif. Akuntabilitas dan regulasi yang tepat dapat mengurangi resiko penyelewengan dari sisi kelembagaan seperti korupsi. Efektif, efisien, dan transparan kelem-

bagaan dan kerangka hukum untuk memastikan transfer fiskal yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menghilangkan berbagai penyimpangan terkait dengan fiskal desentralisasi (Agyemang-Duah *et al.*, 2018; Jütting *et al.*, 2004). Desentralisasi fiskal dapat membawa efisiensi ekonomi yang besar dalam alokasi sumber daya antar sektor publik. Desentralisasi fiskal mampu memperbaiki efisiensi ekonomi semenjak pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat lokal daripada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah akan lebih tanggap terhadap kebutuhan dan preferensi lokal (Fadli, 2014). Adanya kebijakan desentralisasi memberikan optimistis dalam mengurangi kemiskinan dengan kewenangan daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan khususnya dalam program pengentasan kemiskinan.

Ternyata, kebijakan desentralisasi memberikan kontradiksi dalam pembangunan. Adanya desentralisasi bukan untuk mengurangi kemiskinan tetapi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Martinez-vazquez & McNab, 2003). Penerapan desentralisasi fiskal dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan cenderung untuk menutup defisit anggaran, dan menarik anggaran pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan tersebut. Adanya desentralisasi fiskal beresiko pemerintah daerah cenderung akan lebih korup daripada pemerintah pusat, menyebabkan keputusan pengeluaran yang buruk dan penyalahgunaan sumber daya publik. Pada akhirnya upaya pengurangan kemiskinan menjadi sia-sia sebagai akibat dari program untuk orang miskin berkualitas rendah dan tidak merespons kebutuhan mereka (Agyemang-Duah *et al.*, 2018; Crook, 2003).

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan positivis menjelaskan tentang peneliti memulai dengan hubungan sebab-akibat yang secara logika diambil dari hukum sebab-akibat dalam teori umum. Semua proses mengarah pada uji empiris dan konfirmasi hukum (teori) dalam kehidupan sosial. Pada umumnya, perspektif *positivism* menggunakan pendekatan dengan arah deduktif. Pendekatan dengan arahan deduktif dapat mengembangkan dan menegaskan suatu teori yang dimulai dengan konsep abstrak dan hubungan teoritis serta mengarah kepada bukti empiris yang lebih konkret (Neuman, 2011). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan perspektif *positivism* dengan pendekatan deduktif.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan tipe data *cross section* yang meliputi kabupaten dan kota di Provinsi Papua pada tahun 2018. Sumber data penelitian ini adalah laporan dan website seperti Badan Pusat Statistik. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metodologi ekonometrika. Dalam metodologi ini, alat analisis yang digunakan adalah regresi, yaitu suatu alat analisis statistik yang didesain untuk mengukur arah dan besarnya pengaruh satu atau lebih variabel terhadap satu atau lebih variabel dependen (Gujarati & Porter, 2009). Regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$POVR_i = \beta_0 + \beta_1 D1 + \beta_2 DFBHBP_i + \beta_3 EG_i + \beta_4 HDI_i + \varepsilon_i$$

Di mana, i adalah kabupaten/kota; β adalah parameter (konstanta dan koefisien regresi); ε adalah *error term*; EG adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan perkembangan ke-

giatan dalam perekonomian dimana produksi barang dan jasa yang mengalami peningkatan yang digunakan untuk kemakmuran masyarakat; FDB-HBP adalah Desentralisasi Fiskal yang menunjukkan rasio Bagi Hasil Bukan Pajak terhadap Total pendapatan; HDI adalah indek pembangunan manusia; POVR adalah tingkat kemiskinan dan D1 adalah variabel *dummy* yang menunjukkan status daerah (1 daerah pe-mekaran dan 0 daerah lainnya/induk).

Regresi lancung mengakibatkan koefisien regresi penaksir tidak efisien, peramalan berdasarkan regresi tersebut akan meleset dan uji baku yang umum untuk koefisien regresi menjadi tidak sah atau invalid. Anggapan dasar klasik dibuktikan dengan member-lakukan uji diagnostik terhadap suatu model, yang antara lain terdiri atas uji multikolinieritas, uji normalitas, uji linieritas dan uji homoskedastisitas (Gujarati & Porter, 2009; Insukindro, 1991). Guna terhindar dari regres lancung terkait menggunakan alat analisis yang diterapkan dalam penelitian ini perlu dilakukan pendeteksian berupa uji diagnosis berdasarkan anggapan dasar klasik regresi.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Heterogenitas kemiskinan terjadi di kabupaten dan kota Provinsi Papua.

Alat analisis regresi *Ordinary Least Square (OLS)* dengan model ekonometrik digunakan untuk menjawab tujuan penelitian ini mengenai determi-nan dari heterogenitas kemiskinan Ka-bupaten dan Kota di Provinsi Papua. Hasil estimasi model ekonometrik be-sererta uji diagnosis terangkum da-lam tabel 2.

Data yang digunakan dalam pe-nelitian ini adalah data *cross section*, sehingga seperti yang disajikan dalam tabel 2, asumsi model regresi linier klasik (*CLRM assumption*) meliputi u-ji multikolinieritas, uji normalitas resi-dual, uji heteroskedastisitas dan uni spesifikasi model. Menurut Gujarati & Porter (2009), pengujian autokorelasi tidak gunakan karena masalah autoko-relasi biasanya muncul pada data *time series*.

Uji multikolinieritas yang digu-nakan menggunakan VIF. Pada uji VIF, terdapat masalah multikolinieritas yang serius apabila bila VIF ma-sing-masing variabel independen ada yang bernilai lebih dari 10. Berdasar-kan tabel 2 terlihat nilai VIF untuk variabel status daerah, desentralisasi fiskal pertumbuhan ekonomi dan in-deks pembangunan manusia lebih ke-cil dari 10. Jadi dapat disimpulkan ti-dak terdapat masalah multikolinieritas yang serius.

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Ekonometrik

| | | | | |
|--|----------|----------|------------|-----------|
| $P\overline{OVR}_t = 76,5721 - 1,2749D1 + 0,1222DFBHP_t - 1,4662EG_t - 0,6806 HDI_t$ | | | | |
| (0,0000)* | (0,7495) | (0,6576) | (0,0695)** | (0,0002)* |
| $R^2 = 0,6417$; DW-Stat. = 2,0708; F-Stat. = 10,7443; Prob. F-Stat. = 0,000 | | | | |

Asumsi model regresi linier klasik

- (1) **Multikolinieritas (VIF)**
 D1= 1,9679; DFBHBP = 1,6156; EG = 1,2921; HDI = 2,0999
- (2) **Normalitas**
 JB(2) = 0,9677; Prob. (JB) = 0,6164
- (3) **Heteroskedastisitas (White with cross term)**
 $\chi^2(13) = 18,6530$; Prob. (χ^2) = 0,1343
- (4) **Linieritas (Ramsey Reset)**
 F(2,22) = 1,8542; Prob. (F) = 0,1802

Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; **Signifikan pada $\alpha = 0,05$; ***Signifikan pada $\alpha = 0,10$. Angka dalam kurung adalah probabilitas empirik (*p value*) t-statistik.
 Sumber: BPS, diolah.

Normalitas residual akan diuji memakai Jarque Bera (JB). Hipotesis nol menunjukkan distribusi residual normal. Menolak hipotesis nol apabila probabilitas statistik JB lebih kecil sama dengan α . Dari tabel 2, terlihat nilai probabilitas statistik JB adalah sebesar 0,6164 lebih besar dari 0,10. Jadi gagal menolak hipotesis nol, dengan demikian dapat disimpulkan distribusi residual normal.

Uji white digunakan untuk mendeteksi masalah dari heteroskedastisitas. Hipotesis nol menunjukkan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model. Menolak hipotesis nol apabila probabilitas statistik χ^2 lebih kecil sama dengan α . Dari tabel 2, terlihat nilai probabilitas statistik χ^2 adalah sebesar 0,1343 lebih besar dari 0,10. Jadi gagal menolak hipotesis nol, dengan demikian memiliki kesimpulan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam model.

Ketepatan spesifikasi atau linieritas model dalam penelitian ini akan diuji memakai uji Ramsey Reset. Uji ini memiliki hipotesis nol spesifikasi modelnya tepat atau linier. Menolak hipotesis nol apabila probabilitas statistik F lebih kecil sama dengan α . Nilai probabilitas statistik F adalah sebesar 0,1802 lebih besar dari 0,10 (lihat tabel 2). Jadi gagal menolak hipotesis nol, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa spesifikasi modelnya tepat atau linier.

Selanjutnya, pengujian diagnosis dilakukan dengan pengujian kebaikan model (*goodness of fit*). Pengujian kebaikan model ini terdiri dari interpretasi koefisien determinan dan pengujian eksistensi model. Koefisien determinan (R^2) menunjukkan daya ramal dari model terestimasi. Dari tabel 2 terlihat nilai koefisien determinan sebesar 0,6417, artinya 64,17 persen variasi variabel tingkat kemiskinan (POVR) dapat dijelaskan oleh variabel status daerah (D1), desentralisasi fiskal (DF-

HBP), pertumbuhan ekonomi (EG) dan indeks pembangun manusia (HDI). Sisanya 35,83 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Besarnya nilai koefisien determinan tersebut cukup tinggi untuk data *cross section*.

Pengujian kebaikan model selanjutnya terkait model eksis apabila seluruh variabel independen secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak secara simultan bernilai nol). Uji eksistensi model adalah uji F. Hipotesis nol dalam penelitian ini adalah model yang dipakai eksis. Menolak hipotesis nol apabila probabilitas statistik F lebih kecil sama dengan α . Nilai probabilitas statistik F adalah sebesar 0,0000 lebih kecil dari 0,01 (lihat tabel 2). Jadi menolak hipotesis nol, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang dipakai eksis. Model yang dipakai eksis memiliki pengertian bahwa secara simultan variabel variabel status daerah (D1), desentralisasi fiskal (DFHBP), pertumbuhan ekonomi (EG) dan indeks pembangun manusia (HDI) memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan kemiskinan (POVR).

Pengujian diagnosis yang terakhir adalah uji validitas pengaruh variabel independen secara pasial dengan uji t. Hipotesis nol menunjukkan masing-masing variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Menolak hipotesis nol apabila probabilitas statistik t lebih kecil sama dengan α . Berdasarkan tabel 2, probabilitas statistik t yang lebih kecil dari 0,01 adalah variabel indeks pembangunan manusia, sedangkan apabila probabilitas statistik t variabel pertumbuhan ekonomi lebih kecil dari 0,10. Hasil lain dari tabel yang sama menunjukkan probabilitas statistik t variabel status daerah dan desentralisasi fiskal lebih besar dari α . Dengan demikian, variabel indeks pembangu-

nan manusia dan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Papua, sedangkan status daerah dan desentralisasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Dari uji validitas pengaruh di muka terlihat bahwa independen yang memiliki pengaruh signifikan adalah pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien regresi sebesar -1,4662. Pola hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan adalah linier-linier sehingga apabila pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan turun sebesar 1,4662 persen. Sebaliknya apabila pertumbuhan ekonomi turun sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan naik sebesar 1,4662 persen. Variabel indeks pembangunan manusia memiliki koefisien regresi sebesar -0,6806. Pola hubungan antara variabel indeks pembangunan manusia dan tingkat kemiskinan adalah linier-linier sehingga apabila indeks pembangunan manusia naik sebesar 1 maka tingkat kemiskinan turun sebesar 0,6806 persen. Sebaliknya apabila indeks pembangunan manusia turun sebesar 1 persen maka tingkat kemiskinan naik sebesar 0,6806 persen.

Temuan dari penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Papua. Peran pertumbuhan ekonomi yang digunakan pula dalam melihat keberhasilan pembangunan, tepat digunakan untuk menjadi syarat bagi pengurangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat dirasakan secara merata disetiap golongan masyarakat, termasuk penduduk miskin. pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor di mana penduduk miskin be-

kerja (pertanian atau sektor yang padat karya). Adapun secara tidak langsung, hal itu berarti diperlukan pemerintah yang cukup efektif dalam meredistribusikan manfaat pertumbuhan. Dalam hipotesis kuznet, pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki hubungan yang erat. Pada tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung tinggi karena pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari distribusi pendapatan belum merata kesemua golongan. Namun dengan pembangunan yang mulai merata, secara berangsur-angsur mampu mengurangi kemiskinan.

Perlu diperhatikan pula, pertumbuhan tinggi untuk sebagian masyarakat, atau pertumbuhan “tidak terlalu” tinggi, tetapi dapat mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Secara teori ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi sangat terkait dengan investasi. Oleh karena itu, untuk menghindarkan masyarakat dari ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan perlu pertumbuhan ekonomi, yang tidak harus tinggi tetapi dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kita berharap pertumbuhan yang terjadi adalah pertumbuhan ekonomi berkualitas, yaitu pertumbuhan yang diperoleh dari tumbuhnya semua kegiatan ekonomi dan banyak digeluti oleh masyarakat secara luas, dan bukan hanya terjadi pada aktivitas padat modal atau sektor-sektor yang tidak berdampak luas pada penyerapan tenaga kerja.

Temuan menarik lainnya adalah indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sebagai indikator pengukur keberhasilan pembangunan manusia, indeks pembangunan manusia (IPM) yang memiliki konsep dasar yang dimiliki manusia diharapkan mampu membawa perubahan dalam kesejahteraan manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diperhatikan dalam pembangunan, se-

bab mampu menurunkan kemiskinan. Sumber daya manusia menjadi asset yang sangat penting dan investasi yang tidak ternilai dalam jangka panjang, apabila pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan kemiskinan melalui upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia. Meningkatkan pencapaian pembangunan manusia, kabupaten dan kota Provinsi Papua harus meningkatkan strategi pembangunan manusia dalam pembangunan. Strategi pembangunan manusia adalah suatu perubahan besar dalam prioritas pembangunan dengan prinsip memomorsatukan manusia dan menekankan pembentukan modal manusia. Modal manusia memegang peran sentral dalam proses pembangunan. Kualitas seorang manusia sebagai sebuah faktor produksi dianggap ditentukan oleh kondisi fisiknya, tingkat pendidikannya, dan keterampilan yang dimilikinya. Manusia yang berkualitas tinggi adalah manusia yang sehat badannya dan memperoleh cukup pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa status daerah dan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Kondisi kemiskinan di kabupaten dan kota Provinsi Papua tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Semua daerah memiliki tingkat kemiskinan di atas nasional dan hampir seluruh daerahnya juga tingkat kemiskinannya di atas provinsi. Tolok ukur desentralisasi fiskal yang ditinjau dari rasio bagi hasil bukan pajak terhadap total pendapatan belum mampu merepresentasikan keberhasilan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan. Kontribusi penerimaan dan penyerapan bagi hasil bukan pajak yang masih rendah dan belum optimal dalam membiayai kegiatan atau program *pro poor*. Apabila dibandingkan sumber dengan penerimaan pendapatan

daerah lainnya, pendapatan bagi hasil bukan pajak masih sangat kecil. Secara umum, alokasi dana perimbangan masih didominasi oleh dana alokasi umum dan khusus sebagai sumber pendapatan dan menjadi komponen yang mewarnai kapasitas fiskal daerah dalam penyelenggara pemerintahan daerah. Hasil dalam penelitian ini yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widianingrum *et al.* (2019) bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN

Berdasarkan hasil estimasi model ekonometrik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai indikator meningkatnya kinerja perekonomian mampu mengurangi kemiskinan, sedangkan pembangunan manusia dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau sumber daya manusia maju juga mampu menurunkan angka kemiskinan. Temuan lainnya yang mengejutkan bahwa konsekuensi logis euforia otonomi daerah dengan proliferasi daerah belum berpengaruh nyata dalam mengurangi kemiskinan, serta belum berperan nyata desentralisasi fiskal yang diukur dengan rasio bagi hasil bukan pajak dalam menekan angka kemiskinan.

Pemerintah perlu menekankan pertumbuhan ekonomi berkualitas, yaitu pertumbuhan yang diperoleh dari tumbuhnya semua kegiatan ekonomi dan banyak digeluti oleh masyarakat secara luas, dan bukan hanya terjadi pada aktivitas padat modal atau sektor-sektor yang tidak berdampak luas pada penyerapan tenaga kerja. Pemerintah perlu juga membentuk pola kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan pembangunan manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selian itu pula, tanpa menga-

baikan kebijakan desentralisasi, pengalihan potensi sumber daya perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian daerah dalam membiayai pengeluaran daerah, khususnya dalam program pengentasan kemiskinan.

Penelitian ini memiliki batasan dalam periode pengamatan yang disebabkan penggunaan data *cross section*. Penelitian ini hanya mengamati satu tahun saja dalam beberapa kabupaten dan kota di suatu provinsi. Harapannya untuk penelitian kedepannya, silahkan gunakan jenis data dan alat analisis yang lebih tepat sehingga mampu mengamati permasalahan kemiskinan yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

- Achia, T. N. O., Wangombe, A., & Khadioli, N. (2010). A Logistic Regression Model to Identify Key Determinants of Poverty Using Demographic and Health Survey Data. *European Journal of Social Sciences*, 13(1), 38–46.
- Adeyemi, S. L., Ijaiya, G. T., & Raheem, U. A. (2009). Determinants of Poverty in Sub-Saharan Africa. *An International Multi-Disciplinary Journal*, 3(2), 162–177.
<https://doi.org/10.4314/afrrrev.v3i2.43617>
- Agyemang-Duah, W., Kafui Gbedoho, E., Peprah, P., Arthur, F., Kweku Sobeng, A., Okyere, J., & Mengba Dokbila, J. (2018). Reducing Poverty Through Fiscal Decentralization in Ghana and Beyond: A Review. *Cogent Economics and Finance*, 6(1), 1–14.
<https://doi.org/10.1080/23322039.2018.1476035>
- Akerele, D., Momoh, S., Samuel A Adewuyi, Biola B. Phillip, & Olu-muyiwa F Ashaolu. (2012). Socioeconomic Determinants of Poverty Among Urban Households in South-West Nigeria. *International Journal of Social Economics*, 39(3), 168–181.
<https://doi.org/10.1108/03068291211199341>
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN.
- Astrini, N. M. M., & Purbadharmaja, I. B. P. (2013). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendidikan, Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 2(8), 384–392.
- Badan Pusat Statistik. (2017a). *Indeks Pembangunan Manusia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017b). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia*. Jakarta.
- Bogale, A., Hagedorn, K., & Korf, B. (2005). Determinants of Poverty in Rural Ethiopia. *Quarterly Journal of International Agriculture*, 44(2), 101–120.
<https://doi.org/10.5167/uzh-64170>
- Caraka, R. E. (2017). Analisis Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan Pendekatan Spatial Autoregressive Model. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(1), 53–60.
- Crook, R. C. (2003). Decentralisation and Poverty Reduction in Africa: The Political of Local-Central Relations. *Public Administration and Development*, 23(1), 77–88.
- Dartanto, T., & Nurkholis. (2013). Bulletin of Indonesian Economic Studies The Determinants of Poverty Dynamics in Indonesia: Evidence from Panel Data. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(1), 61–84.
<https://doi.org/10.1080/00074918.2013.772939>
- Fadli, F. (2014). Analysis of Direct and Indirect Effect of Fiscal De-

- centralization and Regional Disparity (Case Study Provinces in East and West Indonesia Year 2006-2012). *Journal of Economics and Sustainable Development*, 5(18), 45–56.
- Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (1984). A Class of Decomposable Poverty Measures. *Econometrica*, 52(3), 761–766.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic of Econometric* (5th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
- Insukindro. (1991). Regresi Linier Lancung dalam Analisis Ekonomi: Suatu Tinjauan Dengan Satu Studi Kasus di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 6, 1–13.
- Islam, D., Sayeed, J., & Hossain, N. (2017). On Determinants of Poverty and Inequality in Bangladesh. *Journal of Poverty*, 21(4), 352–371.
<https://doi.org/10.1080/10875549.2016.1204646>
- Jamal, A. (2017). Geographical Economic Concentration, Growth and Decentralization: Empirical Evidence in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 142–158.
<https://doi.org/10.23917/jep.v18i2.2786>
- Jütting, J., Kauffmann, C., Donnell, I. M., Osterrieder, H., Pinaud, N., & Wegner, L. (2004). *Decentralization and Poverty in Developing Countries; Exploring The Impact*.
- Kedir, A. M., & Mckay, A. (2005). Chronic Poverty in Urban Ethiopia : Panel Data Evidence. *International Planning Studies*, 10(1), 49–67.
- Martinez-vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal Decentralization and Economic Growth. *Elsevier*, 31(9), 1597–1616.
[https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00109-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8)
- McWilliam, A. (2011). Marginal Governance in the Time of Pemekaran: Case Studies from Sulawesi and West Papua. *Asiean Journal of Social Science*, 39, 150–170.
<https://doi.org/10.1163/156853111X565869>
- Neuman, W. L. (2011). *Sosial Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Permadi, Y. A. (2018). Growth, Inequality, and Poverty: An Analysis of Pro-Poor Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2), 216–233.
- Prapdopo, A. A. (2018). Determinants of Poverty in East Kalimantan Province, Indonesia. *International Journal If Scientific and Technology Research*, 7(5), 5–8.
- Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 4(2), 210–223.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. R. (2011). *Perencanaan dan Pembangunan Wilayah*. Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Samputra, P. L., & Munanda, A. I. (2019). Korupsi, Indikator Makro Ekonomi dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 12(1), 35–46.
- Seymour, R., & Turner, S. (2002). Otonomi Daerah: Indonesia's Decentralisation Experiment. *New Zealand Journal of Asian Studies*, 4(2), 33–51.
- Singh, A. (2012). Measuring Inequality of Poverty: Theory and an Application to India. *Journal of Poverty*, 16(1), 96–118.
<https://doi.org/10.1080/10875549.2011.639860>

- Sisca HS, V., HAMzah, A., & Syechalad, M. N. (2013). Pengaruh Kesempatan Kerja, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(4), 21–30.
- Sofilda, E., Zilal, H., & Sholeh, A. S. (2013). Human Development and Poverty in Papua Province (An Analysis of Simultaneous Approach on Panel Data Regression). *International Journal of Sustainable Development*, 6(6), 51–62.
- Usman, U., & Diramita. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 01(02), 9–15.
- Widianingrum, I. F., Riyanto, G., & Mulyanto. (2019). The Role of Physical Capital on Reduction Poverty Evidence Regional Autonomy. *International Journal of Economics and Research*, 10(1), 69–85.